

Membangun Perekonomian Berbasis IPTEK

Oleh: Hendra Gunawan

Di tengah hiruk-pikuk Pilpres 2014 ketika itu, ada berita menggembirakan tentang perekonomian Indonesia yang berhasil masuk sepuluh besar dunia (*Kompas*, 3 Mei 2014). Saat itu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyatakan bahwa Indonesia kini sejajar dengan negara-negara lain yang tergolong maju (*Kompas.com*, 5 Mei 2014). Negara-negara yang dimaksud adalah Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brasil, Perancis, dan Inggris.

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini memang mencapai angka yang fantastis, yaitu sekitar Rp 10.000 triliun. Namun, bila kita bagi dengan jumlah penduduk Indonesia, maka kita dapatkan PDB per kapita sekitar Rp 45 juta. Dengan angka ini, Indonesia berada di urutan ke-125, jauh berada di bawah Malaysia, Suriname, bahkan Namibia.

Ada dua hal yang penting untuk dicatat terkait dengan isu ini. Pertama, tanah air Indonesia memang kaya dengan sumberdaya alam, dan dari situlah PDB yang besar kita raup. Namun, jumlah penduduk kita juga besar, sehingga PDB yang besar tadi belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Kedua, untuk mendongkrak PDB per kapita, kita tidak dapat seterusnya mengandalkan kekayaan sumberdaya alam Indonesia. Suatu terobosan perlu digagas untuk perekonomian Indonesia ke depan.

Bila selama ini kita terpaku pada peran Pemerintah dan para pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, maka salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah memperkuat elemen ketiga, yaitu perguruan tinggi (PT) dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan (litbang).

Negara-negara maju seperti Inggris dan Jepang membangun perekonomiannya tidak di atas sumberdaya alam tetapi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang mereka kembangkan. Di sinilah PT dan lembaga litbang memainkan peran pentingnya. Dalam hal ini pula kita menyadari mengapa PDB per kapita masih rendah, yaitu karena perekonomian kita belum diwarnai dengan kemajuan iptek yang kita kembangkan sendiri.

Janji Jokowi-JK

Pilpres 2014 telah berlalu. Apakah kita kemudian dapat berharap pada Pemerintah baru, yang akan dipimpin oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla kelak? Mari kita tengok apa yang telah dijanjikan oleh Jokowi-JK. Merujuk pada Pembukaan UUD 1945 tentang arah tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, Jokowi-JK hendak mengatasi

problem pokok bangsa, yaitu merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Jokowi-JK kemudian mencanangkan visi Trisakti-nya, yaitu “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.”

Walau perekonomian kita membaik dari waktu ke waktu, Jokowi-JK menyadari adanya ketergantungan Indonesia dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara selama ini dinilai tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar bagi kesejahteraan rakyatnya.

Di era globalisasi dan perdagangan bebas ini, Jokowi-JK berpandangan bahwa kemandirian suatu bangsa bergantung pada kualitas SDM yang dimilikinya. Dalam misinya, Jokowi-JK mencantumkan dua agenda yang menarik perhatian saya, yaitu “mewujudkan masyarakat maju” dan “mewujudkan bangsa yang berdaya-saing”.

Untuk meningkatkan daya saing bangsa, penting dicatat janji Jokowi-JK untuk meningkatkan anggaran riset guna mendorong inovasi teknologi. Selain itu, pasangan ini juga menjanjikan adanya penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional, yakni kerjasama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi.

Selebihnya, Jokowi-JK mengemukakan sejumlah program berkenaan dengan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk pendidikan tinggi, pasangan ini berjanji “akan memberikan perhatian yang tinggi terhadap pendidikan yang berbasiskan peningkatan iptek.”

Harapan Kita

Disadari atau tidak, setelah 69 tahun mengenyam kemerdekaan, kita hanya mengekor bahkan menjalankan agenda bangsa lain. Sumberdaya alam yang melimpah di satu sisi menjadi sumber nafkah kita, namun di sisi lain sebetulnya telah kita eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Pembangunan di Indonesia terjadi, tetapi pembangunan Indonesia menuju bangsa yang maju dan sejahtera belum terwujud.

Jokowi-JK melihat masalah ini, termasuk pentingnya penguasaan iptek dalam meningkatkan daya saing bangsa. Walau masih bersifat normatif, rencana dan program Jokowi-JK untuk membangun perekonomian berbasis iptek cukup menjanjikan.

Terkait dengan pengembangan iptek, upaya peningkatan anggaran riset, baik pada PT maupun lembaga litbang, yang selama ini berkutat di bawah 0,1% dari PDB, sesungguhnya sangat dinantikan dan jauh lebih penting daripada rencana memisahkan pengelolaan PT dari Kemendikbud dan menyatukannya dengan Kemristek. Bercermin pada negara lain yang mengalokasikan anggaran sebesar 1% hingga 3% dari PDB-nya untuk riset, kita sangat

berharap pada Pemerintah yang akan datang untuk dapat meningkatkan anggaran riset dari 0,1% menjadi setidaknya 1% dari PDB.

Peningkatan kualitas fasilitas PT pun perlu diperhatikan, namun di tahap awal, anggaran juga diperlukan untuk peningkatan kualifikasi dosen dan tenaga peneliti serta perekrutan tenaga baru yang berkualitas, baik di PT maupun lembaga litbang yang ada. Saat ini, jumlah doktor dan tenaga ahli yang kita punyai di negara sebesar Indonesia masih jauh dari massa kritis. Padahal, massa kritis itu diperlukan bila Jokowi-JK memang benar-benar ingin membangun suatu sistem inovasi nasional, di mana insan PT dan litbang memainkan perannya yang sentral.

Di era iptek ini, visi untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat akan menjadi mimpi yang indah namun hampir mustahil terwujud tanpa ditopang penguasaan dan pengembangan iptek modern.

Bandung, 31 Agustus 2014